

## **Strategi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Agenda Tahun Ekonomi Kreatif Internasional**

**Rana Yusrianti Meilina<sup>1,\*</sup>, Risky Oktavian<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

[\\*ranaymeilina@gmail.com](mailto:*ranaymeilina@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Seiring perkembangan zaman, ekonomi kreatif muncul sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memanfaatkan teknologi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama 81 negara lainnya, Pemerintah Indonesia menjadi inisiator dalam penyelenggaraan International Year of Creative Economics for Sustainable Development (IYoCE) 2021. Dalam rangka IYoCE 2021, Indonesia menerapkan kebijakan nasional dan kebijakan luar negeri untuk ekonomi kreatif. pembangunan, namun terdapat kendala dan tantangan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui diplomasi ekonomi dalam rangka IYoCE 2021. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan konsep Sustainable Development Goals (SDGs), konsep ekonomi kreatif dan konsep diplomasi ekonomi. Ketiga konsep tersebut akan memahami dan menganalisis bentuk ekonomi kreatif Indonesia dan strategi pengembangan ekonomi kreatif yang menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianalisis berdasarkan studi kasus yang terjadi yaitu International Year of Creative Economics 2021 dan didukung sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menjadi inisiator dalam IYoCE 2021, Indonesia melakukan strategi melalui diplomasi ekonomi dengan aktor global untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan menandatangani nota kesepahaman dan mengadakan pertemuan global ekonomi kreatif untuk investasi, pertukaran dan pelatihan pekerja bisnis kreatif. dan pertukaran barang dan jasa.

**Kata kunci:** Indonesia, Diplomasi, Ekonomi Kreatif Berkelanjutan, IYoCE

### **ABSTRACT**

*Along with the times, the creative economy emerged as an alternative to improve the country's economy by utilizing technology and contributing to sustainable development. Through the United Nations along with 81 other countries, the Government of Indonesia is the initiator in organizing the 2021 International Year of Creative Economics for Sustainable Development (IYoCE). Within the framework of IYoCE 2021, Indonesia implements national policies and foreign policies for the creative economy. development, but there are obstacles and challenges in it. This study aims to look at the form of strategy that is being carried out by Indonesia in developing the creative economy through economic diplomacy in the context of IYoCE 2021. These problems are studied using the concept of Sustainable Development Goals (SDGs), the concept of creative economy and the concept of economic diplomacy. These three concepts will understand and analyze the form of Indonesia's creative economy and creative economy development strategies that create sustainable development. This research also uses qualitative research methods which are analyzed based on case studies that have occurred, namely the International Year of Creative Economics 2021 and are supported by primary and secondary data sources. This research finds that by becoming the initiator at IYoCE 2021, Indonesia is carrying out a strategy through economic diplomacy with global actors to develop the creative economy by signing a memorandum of understanding and holding a creative economy global meeting for investment, exchange and training of creative business workers. and exchange of goods and services.*

**Keywords:** Indonesia, Diplomacy, Sustainable Creative Economy, IYoCE.

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berbicara tentang strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. Strategi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam melakukan proses pencapaian tujuan dengan cara menentukan tahapan-tahapannya seperti menentukan tujuan, sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, dan pengelolaan sumber daya (Thompson, 2017). Sedangkan Fanaqi (2018) & Wati (2019) strategi sebagai perencanaan dan manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang diartikan sebagai proses mencapai tujuan dengan berdasarkan rencana yang kuat dan dalam waktu yang sudah

Partisipasi ialah individu-individu yang terlibat dalam bermacam-macam tindakan didalam kehidupan politik berupa kegiatan dalam memberi atau tidak dalam mendukung kegiatan politik seperti kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilu/pemilukada (Amin, 2019). Partisipasi juga melibatkan mental dan emosi dibandingkan dengan fisik seseorang, maka dari itu pribadi seseorang diharapkan lebih banyak terlibat dibandingkan dengan fisiknya sendiri (Novita & Fitri, 2020). Seperti partisipasi di politik merupakan kegiatan yang terlibat pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya (Kusmanto, 2013). Partisipasi politik ini juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum (Lestari & Arumsari, 2018).

Pemilih pemula merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan didalam Partai Politik (Parpol) karena pemilih pemula merupakan suatu individu yang akan memasuki usia memilih untuk pertama kali dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu/pemilukada (Ansori, 2019). Pemilih pemula digambarkan memiliki sifat dan karakter yang masih labil dalam memilih, dan belum memiliki pemahaman yang cukup baik terkait pengetahuan politik (Setyawan & Azmi, 2020). Berdasarkan kategori umur pemilih pemula yaitu rata-rata berusia 17-22 tahun, mereka memiliki beberapa karakteristik yaitu belum pernah memilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu/pemilukada, masih belum mempunyai pengalaman dalam menggunakan hak pilihnya, memiliki antusias

yang tinggi terhadap pemilu, dan memiliki rasa berpartisipasi yang tinggi terhadap pemilu (Wibowo et al., 2020). Pemilih pemula juga menjadi sasaran strategis dikalangan pemilu salah satunya ialah mereka merupakan warga negara Indonesia yang baru pertama kali dalam memberikan hak suara mereka didalam pemilu/pemilukada sehingga perlu diberikan pemahaman yang baik terhadap proses pemilu, dan wajib diberikan arahan tentang bagaimana aturan dalam memilih yang benar (Ardiani et al., 2019; Nur Wardhani, 2018).

Jika dilihat secara partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 yang lalu, pemilih pemula secara nasional memiliki angka yang cukup signifikan dan masuk kedalam kategori pemilih berdaulat di Indonesia, terdapat peningkatan suara secara nasional sebagaimana daftar pemilih tetap berikut ini:

Tabel 1:  
Pemilih Pemula Pemilu Serentak Tahun 2019

NO	Tahun	Jumlah Pemilih Pemula	Jumlah Pemilih
1.	Tahun 2004	27 juta	147 juta
2.	Tahun 2009	36 juta	171 juta
3.	Tahun 2014	56 juta	186 juta
4.	Tahun 2019	60 juta	193 juta

Sumber: KPU Republik Indonesia

Sebagaimana tabel diatas dapat dipahami bahwa KPU Republik Indonesia sebagai penyelenggara demokrasi di Indonesia mendeskripsikan jumlah pemilih pemula pada setiap proses pemilu di Indonesia terus bertambah. Bahkan pada tahun 2019, pemilih pemula dibawah usia 35 tahun hampir mendekati angka 100 juta orang.

Sementara itu berdasarkan data dari KIP Aceh, jumlah pemilih pemula ditahun 2017 tercatat di seluruh Aceh sebanyak 123.655 orang atau sekitar (3,6 persen) dari total pemilih di Aceh serta adapun jumlah pemilih pemula terbanyak di Aceh pada Pilkada 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel II:  
Pemilih Pemula Pemilu Serentak di Aceh  
Tahun 2019

NO	Nama Kabupaten	Jumlah Pemilih Pemula
1.	Aceh Utara	14.721 orang
2.	Kabupaten Aceh Timur	11.012 orang
3.	Kabupaten Pidie	10.546 orang
4.	Kabupaten Bireuen	10.25 orang

Sumber: KIP Aceh

Dalam negara demokrasi partisipasi politik merupakan suatu indikator penting dari implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang berada di atas yang berdasarkan oleh rakyat dan diwujudkan dengan keterlibatan mereka dalam pemilu (Padang & Megawati, 2018). Pentingnya suatu partisipasi politik kepada masyarakat pemilih pemula yaitu berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bersifat demokrasi dalam menggunakan sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pada pengambilan keputusan daerah (Azirah, 2019). Makin tinggi tingkat partisipasi politik yang dilakukan dapat diindikasikan pula bahwa rakyat akan lebih memahami bahkan melibatkan diri dalam kegiatan demokrasi (Sakinah, 2021). Namun, jika tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya ditemukan rakyat yang sangat kurang berpartisipasi dan tidak peduli terhadap masalah kegiatan demokrasi seperti sikap golongan putih (golput) dalam pemilu/pemilukada (Yuliati, 2017). Rendah atau tingginya tingkat partisipasi politik yang dilakukan merupakan indikator penting terhadap jalannya suatu proses demokrasi (Putri, 2017). Maka dari itu tingkat partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat terutama kepada pemilih pemula (Islah et al., 2020), hal tersebut merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi serta perwujudan dari kedaulatan rakyat (Wardhani, 2018).

Pemilih pemula sangat besar pengaruhnya bagi Partai Politik peserta pemilu dan para calon kandidatnya, bahkan perburuan

suara pemilih pemula sudah berlangsung sejak pemilu yang sudah diselenggarakan pada pemilu sebelumnya (Mahmudah, 2016). Banyak yang sudah memperhitungkan suara dari pemilih pemula dalam proses kampanye sehingga bermacam-macam cara yang bisa dilakukan oleh Partai Politik untuk mempengaruhi dan menghimpun suara para pemilih pemula ini (Irrubai, 2014). Dengan hal tersebut harus diatasi dengan diterapkannya partisipasi politik dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tingkat pendidikan politik sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik yang mana pendidikan yang tinggi dapat memberikan suatu informasi dan permasalahan-permasalahan mengenai politik, bisa menganalisa serta menciptakan kemampuan dalam berpolitik (Azirah, 2019). Dengan begitu, dalam melakukan upaya meningkatkan partisipasi politik kepada pemilih pemula, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya harus menentukan strategi yang tepat bagi pemilih pemula gunanya agar pemilih pemula akan cenderung lebih paham dan mampu dalam mengambil keputusan yang rasional pada perkembangan politik di Indonesia (Ansori, 2019; Munawarah & Kristanto, 2022).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun kewenangan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat, yaitu salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran Partai Politik, Legislatif, Pemilu, Pilkada Ormas, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Yayasan dan Forum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan cara memfasilitasi pendidikan politik seperti melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat/sosialisasi serta menyelenggarakan forum diskusi politik secara tatap muka.

Menurut data dari KPU Aceh Barat, jumlah pemilih pemula di Aceh Barat pada pilkada tahun 2017 berjumlah 4.346 orang

(3,31 persen), yang terdiri dari pemilih pemula Laki-laki sejumlah 2.234 orang dan Perempuan sejumlah 2.112 orang. Jika dibandingkan dari jumlah partisipasi pemilih pemula di beberapa kabupaten lain yang ada di Aceh khususnya 4 kabupaten yang tercatat masuk dalam kategori pemilih pemula terbanyak di Aceh, Kabupaten Aceh Barat termasuk kedalam kategori jumlah pemilih pemula yang masih rendah. Rendahnya partisipasi pemilih pemula di Aceh Barat belum memiliki kesiapan dalam menentukan pilihan. Selain itu, padatnya kegiatan mereka sebagai pelajar dan pekerja memiliki kegiatan padat yang membuat partisipasi politik dianggap sebagai pengganggu kegiatan utama.

Selanjutnya, tingkat pendidikan dan pengalaman mereka yang masih rendah akan membuat pemilih pemula minder dalam kegiatan politik, karena persepsi mereka terhadap politik untuk kalangan orang dengan pendidikan tinggi dan sudah berpengalaman di dalam politik (Yusnedi & Utami, 2019). Ditambah dengan pemberitaan di media tentang politisi membuat pemilih pemula tidak percaya akan politik (Pangestuti et al., 2018). Hal ini kemudian membuat pandangan baru tidak adanya calon maupun politisi yang mampu memberi perubahan bagi daerah maupun Indonesia (Djuwita, 2016; Rivai, 2016). Khususnya pada Kecamatan Johan Pahlawan ini menjadi masalah yang harus terus dibenahi oleh berbagai pihak seperti salah satunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.

Pemilih pemula selama ini hanya dijadikan sebagai objek politik oleh partai politik untuk memenangkan pemilu yang mana pemilih pemula dilihat hanya sebagai lumbung suara tanpa adanya pendidikan dan kesadaran politik yang mencerdaskan serta pengetahuan akan proses pemilu dan bahkan pemilih pemula berpotensi besar dalam bersikap apatis. Agar terhindarnya dari hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seharusnya memiliki upaya dan strategi khusus dalam menyikapinya. Maka dari itu, tujuan dari

penulisan ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana rencana strategis yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi politik terhadap pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kecamatan Johan Pahlawan”.

Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis diantaranya adalah penelitian oleh Bouk dkk, (2020), Gleko dkk, (2017), dan Wati (2019). Ketiga penelitian tersebut berhubungan dengan strategi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang strategi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait partisipasi politik pemilih pemula yaitu dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap pemilihan tindakan, tahap alokasi sumber daya, tahap pelaksanaan dan perencanaan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa strategi yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena terhalang oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta faktor determinan pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi dalam memilih salah satunya ialah pengaruh dari lingkungan keluarga, perasaan tidak mampu, dan terhalang dengan kesibukan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan Chandler, A.D., dalam bukunya J. Salusu (1966) mengemukakan bahwa penerapan strategi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dan kendala strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan partisipasi politik pemilih pemula.

## 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan karena salah satu tugas mereka yaitu sebagai pelaksana dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dan peneliti ingin mengetahui strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Adapun tujuan dari pendekatan deskriptif yaitu untuk mengumpulkan informasi terkait status gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer berupa observasi dan wawancara, dan data sekunder berupa mencari data dan informasi dari berbagai literatur/referensi yang bersumber dari jurnal, serta internet. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini antara lain:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Abdurrani, S.Pd, M.Pd	Kepala Badan Kesbangpol	Kesbangpol
2.	Teuku Moerthi Yoertha Wood, SE	Kabid Ideologi Wasbang	Kesbangpol
3.	Yulian Fitri, SE	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kesbangpol
4.	Saifullah, SE	Subbidang Organisasi Masyarakat	Kesbangpol
5.	Asli Yanti	Pengelola Barang Milik Negara	Kesbangpol

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan pahlawan.

Strategi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh organisasi dan individu dengan berfokus dalam menentukan formulasi dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, dan pengalokasian sumber daya yang disertai penyusunan suatu cara untuk upaya bagaimana tujuan tersebut menghasilkan kemenangan (Handoyo, 2011). Dari ketiga langkah tersebut apabila dilaksanakan dengan baik akan mencapai hasil yang baik pula. Berlandaskan informasi dan hasil pengamatan peneliti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan, strategi yang digunakan ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih pemula. Menurut Chandler, Jr dalam buku J. Salusu penerapan strategi dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa langkah tahapan yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya (Arifin, 2017).

#### 1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Sasaran jangka panjang merupakan upaya organisasi dalam melakukan perencanaan yang mempertimbangkan beberapa aspek penting yaitu mengenai kondisi lingkungan dan identifikasi ancaman serta peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, mengidentifikasi tujuan dari nilai-nilai yang akan dicapai, serta syarat strategi dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Gleko et al., 2017). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas yaitu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, mereka telah memiliki tahapan strategi yaitu dengan mengadakan program sosialisasi dan diskusi-diskusi politik. Yulian Fitri selaku salah satu pegawai di bidang Politik dalam negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam wawancara mengatakan “Untuk rencana dan kegiatan kedepan kami akan membuat program sosialisasi untuk pemilih pemula kelas 3

(tiga)/usia beranjak 17 tahun. Rencananya akan diundang perwakilan dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat untuk mengikuti sosialisasi dan pastinya mengundang narasumber terbaik dengan target semua pemilih pemula harus bisa melakukan pemilihan. Strategi Badan Kesbangpol sebisa mungkin akan mengajak mereka ikut turut berpartisipasi jangan sampai mereka golput (golongan putih)”, (wawancara Senin, 13 Juni 2022).

Program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi tentang jadwal pemilihan, bagaimana tahapan memilih yang benar, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan tentang hak dan kewajibannya dalam memilih serta meningkatkan partisipasi politik agar mencerdaskan pemilih pemula untuk terbuka mata dan pikirannya tentang politik. Sedangkan sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu pemilih pemula.

Sosialisasi politik merupakan unsur pendidikan politik yang mampu dalam membentuk kepribadian dan kesadaran dalam berpikir politik, pendidikan politik juga berfungsi untuk membangun kemampuan dalam membentuk pola partisipasi masyarakat yang efektif dalam aktivitas politik suatu negara guna perilaku tersebut dapat dipraktikkan dalam sistem politik. Pendidikan politik merupakan cara yang sistematis untuk mengubah sesuatu, dimana cara tersebut ditujukan untuk masyarakat agar paham tentang peran, fungsi, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Cahyani (2019) Adapun tiga aspek tujuan sosialisasi politik yaitu:

#### 1. Membangun Kepribadian Politik

Membangun kepribadian politik ini lebih mengarah kepada memberikan pendidikan mengenai pemahaman atas nilai-nilai yang dianut suatu negara yang dijadikan sebagai landasan untuk membina serta mengembangkan diri untuk membentuk kepribadian didalam kehidupan ranah politik. Dengan pendidikan politik ini masyarakat dapat menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab serta keterampilan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan dengan nilai norma yang berlaku.

#### 2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan suatu pandangan yang mencakup seluruh dunia internasional dengan sudut pandang yang khas, dimana jika pandangan tersebut tanpa mempunyai sudut pandang yang khas maka disebut pandangan dangkal atau bukan merupakan kesadaran politik. Didalam bahasa politik, kesadaran politik merupakan kondisi politik atau iklim politik suatu bangsa yang mampu merangsang kesadaran masyarakat dalam menganalisis secara kritis dan rasional terhadap permasalahan politik disuatu negara.

#### 3. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif didalam sosialisasi politik ialah suatu usaha yang menyadarkan fungsi politik oleh setiap individu dalam merubah sikap seseorang agar lebih memiliki rasa keinginan yang tinggi dalam berpartisipasi secara aktif seperti berusaha mengajukan usul, kritikan, serta perbaikan untuk meluruskan mengenai suatu kebijakan dalam memilih pemimpin yang dipercaya, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam proses politik.

Menurut sudut pandang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, manfaat sosialisasi politik lebih tepatnya untuk meningkatkan pemahaman belajar terhadap peran, fungsi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berpolitik dan berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kemandirian dan pencapaian prestasi dalam menyelenggarakan kehidupan politik, dan manfaat utamanya yaitu memiliki rasa partisipasi politik yang demokratis terhadap masyarakat sehingga mampu dalam mengembangkan sistem politik yang demokratis juga berlandaskan pancasila.

#### 2. Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode *Go To School dan Forum Group Discussion (FGD)*. Pada metode ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memakai pola penyampaiannya seperti simulasi, diskusi bersama narasumber, dan melakukan permainan game seperti kuis-kuis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan pesan tentang kepemiluan, hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Teuku Moerthi Yoertha Wood, SE selaku Kabid Ideowasbang atau sebelumnya mantan Kabid

dari bidang Politik dalam negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam wawancara mengatakan “ Sosialisasi pemilih pemula yang kami laksanakan bukan hanya terkhusus pada satu kegiatan pemilih pemula saja, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, kita juga memasukan materi pembahasan mengenai pemilu yang khususnya tentang pemilih pemula di setiap sekolah, metode yang digunakan juga sama yaitu dengan mendatangi ke sekolah-sekolah bahkan dengan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan dari tahun 2020 jumlah sekolah yang sudah kita datangi sekitar 25-30 sekolah yang ada di Aceh Barat, dengan menyampaikan materi bagaimana itu pemilu, apa saja yang dilaksanakan saat pemilu” (wawancara Kamis, 16 Juni 2022). Adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu berupa:

#### 1. Sosialisasi Go To School

Pada sosialisasi yang sudah dilakukan ini pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini melakukan sosialisasi dengan mendatangi kesekolah-sekolah seperti salah satunya di SMA N 4 Wira Bangsa. Yang mana sosialisasi dilakukan dengan mengundang narasumber terbaik yang berkaitan dengan materi dan juga mengundang pejabat-pejabat daerah seperti Bupati Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, dan Dandim Aceh Barat dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi ini bahkan juga menjadi narasumber pada sosialisasi ini. Sasaran dari sosialisasi ini yaitu hanya perwakilan seluruh kelas 2 siswa dan siswi SMA N 4 Wira Bangsa.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di SMA N 4 Wira Bangsa Aceh Barat

Adapun rencana kedepan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pemilu selanjutnya dalam

meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yaitu dengan kegiatan sosialisasi juga hanya saja metode nya yang berbeda dengan mengundang perwakilan satu atau dua orang dari seluruh sekolah SMA kelas 3 yang ada di Aceh Barat.

#### 2. Forum Group Discussion (FGD)

Forum Group Discussion merupakan suatu kegiatan diskusi yang terdiri dari beberapa narasumber dan peserta yang terbatas. Forum Group Discussion ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat, ide, dan keyakinan orang lain tentang topik yang akan dibahas. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai materi ideologi pancasila dan diselipkan dengan materi pemilihan umum khususnya pemilih pemula. Pada kegiatan ini peserta yang diundang pun terdiri dari beberapa siswa dan siswi SMA N 4 Wira Bangsa, siswa dan siswi Darul Muta'limin, beberapa instansi pemerintah Aceh Barat dan beberapa mahasiswa dari Universitas Teuku Umar. Kegiatan ini dilakukan di aula Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Aceh Barat dan dilakukan secara siaran langsung/live streaming.



Gambar 2. Kegiatan FGD di Aula RRI Aceh Barat.

Metode yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat cocok diterapkan karena sasarannya anak remaja yang mulai berusia 17 tahun sehingga pola sosialisasi seperti melakukan permainan game seperti kuis yang berisikan pemahaman mengenai pemilu, dan bahkan dengan berdiskusi sehingga tidak akan membuat peserta jenuh, dan peserta pun dapat dengan mudah menerima pemahaman tersebut. Dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini kepada

pemilih pemula tersebut telah menunjukkan kesesuaian antara materi, sasaran, dan metode yang digunakan sehingga strategi itu telah sejalan dengan peraturan yang ditetapkan.

Namun, jika dilihat dari data yang bersumber dari KPU Aceh Barat, jumlah pemilih pemula di Aceh Barat pada pilkada tahun 2017 berjumlah 4.346 orang (3,31 persen), yang terdiri dari pemilih pemula Laki-laki sejumlah 2.234 orang dan Perempuan sejumlah 2.112 orang. Jika dibandingkan dari jumlah partisipasi pemilih pemula di beberapa kabupaten lain yang ada di Aceh khususnya 4 kabupaten yang tercatat masuk dalam kategori pemilih pemula terbanyak di Aceh, Kabupaten Aceh Barat termasuk kedalam kategori jumlah pemilih pemula yang masih rendah. Dengan begitu, strategi dengan kegiatan sosialisasi go to school dan forum group discussion (FGD) yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat belum memberi dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat terdapat belum adanya kegiatan yang menarik, salah satu contohnya seperti program khusus demokrasi ditingkat sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat masih terbilang rendah.

### **3. Alokasi Sumber Daya**

Alokasi sumber daya ialah salah satu yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam penggunaan tertentu. Alokasi sumber daya ini berkaitan pada kemampuan suatu individu atau organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dari suatu individu atau organisasi tersebut. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kemampuan sumber daya atau mempersiapkan kemampuan panitia dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilih pemula masih belum terlaksana dan hal ini pun menjadi kendala didalam proses pelaksanaannya. Hal ini disampaikan Teuku Moerthi Yoertha Wood, SE selaku Kabid Ideowasbang atau sebelumnya mantan Kabid dari bidang Politik dalam negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam wawancara mengatakan “ seharusnya para panitia ini diberikan pembekalan terlebih dahulu agar mereka

menguasai materi terhadap apa yang akan disampaikan nantinya kepada pemilih pemula contohnya mereka harus dibekali dengan materi-materi pemilu, penjelasan-penjelasan tentang apa itu pemilu, dan mempunyai ilmu dalam pendekatan dengan kaum milenial, tetapi yang terjadi dilapangan belum ada giat seperti itu yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Barat ” (wawancara Kamis, 16 Juni 2022).

### **Kendala Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan**

Kendala ialah adanya hambatan didalam proses pelaksanaan yang menyebabkan kegiatan tersebut dapat terganggu dan tidak dapat terlaksana dengan baik, dan akan mempengaruhi hasil akhir yang akan dicapai (Gleko et al., 2017). Dalam melaksanakan strategi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan strategi tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan kendala terkait kurangnya dan lamanya proses pencairan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menghambat proses persiapan pelaksanaan strategi tersebut, sebagaimana hasil wawancara oleh Yulian Fitri, SE, selaku pegawai pada bidang Politik Dalam Negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam wawancara mengatakan “ untuk anggaran mulai tahun kemarin sudah dimintakan bahwa tahapan pemilu ini sudah dimulai, seharusnya ditahun 2022 ini float anggaran untuk pelaksanaan desk pilkada itu sudah ada, namun demikian kebijakan dari pemerintah atau pemerintah daerah aceh barat itu diberikan ditahun 2023” (wawancara, Senin, 13 Juni). Kemudian anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu tidak seimbang dengan tahapan proses pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memilih beberapa cara tindakan yang dianggap paling penting dalam mendukung pelaksanaan tersebut. Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan, maka dari itu pemerintah wajib untuk memperhatikan kesiapan finansial dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu ini.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang mana didalam suatu organisasi jika memiliki sumber daya manusia yang tinggi maka akan sangat berpengaruh dalam meningkatnya pencapaian suatu tujuan organisasi tersebut. Akan tetapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini menemukan kendala yang menjadi penghambat dalam kegiatan partisipasi politik yaitu berupa kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia sehingga menjadi penghambat kinerja mereka dalam melakukan proses persiapan kegiatan partisipasi politik.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dapat dilihat dari tiga indikator yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menunjukkan rencana kegiatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula berupa Sosialisasi dan Forum disukusi. (2). Tahap pemilihan tindakan, pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan metode go to school dan forum group discussion namun strategi dengan kegiatan sosialisasi go to school dan forum group discussion (FGD) yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat belum memberi dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat terdapat belum adanya kegiatan yang menarik. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat masih terbilang rendah. (3). Tahap alokasi sumber daya, pada tahap ini belum adanya upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kemampuan sumber daya atau mempersiapkan kemampuan panitia dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilih pemula.

Kendala strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yaitu yang pertama kurangnya dan lamanya proses pencairan anggaran yang

diberikan oleh pemerintah, sehingga menghambat proses persiapan pelaksanaan strategi tersebut. Kedua, kekurangan sumber daya manusia dan sarana pra sarana tidak lengkap sehingga menjadi penghambat kinerja mereka dalam melakukan proses persiapan kegiatan partisipasi politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2019). Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik. *Jurist-Diction*, 2(3), 965.  
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14366>
- Ansori, Z. (2019). Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 49–62.  
<https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.812>
- Ardiani, D., Sri Kartini, D., & Ganjar Herdiansyah, A. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18.  
<https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Arifin, A. (2017). Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin diperguruan tinggi. *EDUTECH Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3 No 1(1), 117–132.
- Azirah. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 86–100.  
<https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>
- Bouk, M. D., Festianto, D., Ip, S., Seran, M. S. B., Ab, S., & Si, M. (2020). *Jurnal Poros Politik ISSN: 2528 - 0953 Strategi Komisi Pemilihan Umum ( Kpu ) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020 Jurnal Poros Politik ISSN: 2528 - 0953*. 23–29.

- Cahyani, C. H. (2019). *Sosialisasi politik dan partisipasi politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. 22.
- Chandler, A.D., J. (1966). *Strategy and Structure Doubleday, Anchor Books Edition, New York Title*.
- Djuwita, A. (2016). Politisi Perempuan Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Robert Entment Atas Pemberitaan Politisi Perempuan Di Media Cetak). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4203>
- Fanaqi, C. (2018). Strategi Komunikasi Kpu Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut. *Journal.Uniga.Ac.Id*, 4(1), 24–41.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 6(1), 102244.
- Handoyo, S. (2011). Sinergi Antara Good Corporate Governance Dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Meminimalisir Dan Pencegahan Fraud Dalam Suatu Organisasi. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 10(9), 1257–1269. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol10.iss9.art4>
- Irrubai, M. L. (2014). Partai Politik Dan Pemilih Pemula. *Society*, 5(2), 61–71. <https://doi.org/10.20414/society.v5i2.1458>
- Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 46–50. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969>
- Kusmanto, H. (2013). *Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 1, 63–72.
- Mahmudah, D. (2016). Akses Informasi Politik (Perspektif Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 20(2), 241. <https://doi.org/10.31445/jskm.2016.200208>
- Munawarah, R., & Kristanto, A. A. (2022). Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i1.7081>
- Novita, D., & Fitri, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019. *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya*, 7(2), 56–84.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Padang, A. T., & Megawati. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*. 2(September 2020), 522–532.
- Pangestuti, S., Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2018). Pembelajaran Politik untuk Pemilih Pemula Melalui Media Sosial di Purwokerto – Jawa Tengah. *Warta ISKI*, 1(02). <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v1i02.21>
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Rivai, A. B. (2016). Politisasi Media di 2014: Aburizal Bakrie dan Segmen Pemilih Pemula. *Politik Indonesia: Indonesian*

- Political Science Review*, 1(1), 30.  
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9078>
- Sakinah, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Sebagai Implementasi Demokrasi*.  
<https://osf.io/preprints/hra7t/%0Ahttps://osf.io/hra7t/download>
- Setyawan, R., & Azmi, A. (2020). Persepsi Pemilih Pemula tentang Hak Memilih dalam Mengikuti Pemilu di Nagari Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. *Journal of Civic Education*, 2(5), 440–445.  
<https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.289>
- Thompson, J. D. (2017). Organizations in action: Social science bases of administrative theory. In *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781315125930>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Wati, R. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- Yuliati, R. (2017). Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 2(02).  
<https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.840>
- Yusnedi, & Utami, S. (2019). Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. In *Books.Google.Co.Id*.  
<https://books.google.co.id/books?id=8bP ODwAAQBAJ&pg=PA2&dq=pengertian+pemilu&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwii rr-Y1avuAhVJ7XMBHb-wAmMQ6AEwA3oECAIQAg#v=onepage&q=pengertian+pemilu&f=false>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.

